

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELAMATKAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI ERA
PANDEMI COVID-19
(Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam)**

Muhamad Aqim Adlan

*IAIN Tulungagung
adlanaqim1@gmail.com*

***Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk melihat peran dan langkah pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perspektif ekonomi Islam. hal ini didasarkan pada era pandemi COVID-19 ini sektor ekonomi (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mengalami permasalahan. Sehingga kondisi tersebut diperlukan sebuah langkah dan peran pemerintah dalam merspon permasalahan di atas. Kajian ini merupakan kajian pustaka library research) yang bertujuan untuk melihat peran pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa: Pertama, peran pemerintah Indonesia dalam menyelematkan sektor UMKM di era pandemi COVID-19 dengan menerbitkan kebijakan berupa bantuan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM serta melakukan*

program kartu pra kerja. Kedua, dalam perspektif ekonomi Islam peran pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM merupakan perwujudan nilai-nilai fundamental dari konsep ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, UMKM, COVID-19, Ekonomi Islam.*

Abstract: *This study aims to see the role and steps of the government in saving micro, small and medium enterprises (UMKM) from an Islamic economic perspective. This is based on the era of the COVID-19 pandemic, the economic sector (UMKM) is one of the sectors that is experiencing problems. So that this condition requires a step and the role of the government in responding to the problems above. This study is a library research study which aims to see the role of the government in saving the UMKM sector from an Islamic economic perspective. The findings in this study indicate that: First, the role of the Indonesian government in saving the UMKM sector in the era of the COVID-19 pandemic by issuing policies in the form of assistance and assistance to UMKM players and conducting a pre-work card program. Second, from the perspective of Islamic economics, the role of the government in saving the UMKM sector is a manifestation of the fundamental values of the Islamic economic concept.*

Keywords: *Role of Government, UMKM, COVID-19, Islamic Economy.*

Pendahuluan

Awal Tahun 2020 Indonesia terkena pandemi covid 19. Pandemi tersebut mulai terasa di awal Bulan Maret tahun ini. Tidak terasa hampir Sembilan bulan pandemi ini melanda Indonesia. Telah banyak korban berjatuhan mulai dari warga sipil sampai tenaga medis. Penyebaran pandemi ini begitu cepat mulai dari sabang sampai merauke.¹ Sebagai salah satu Negara yang terkena dampak penyebaran

¹ KOMPAS.com, "Perjalanan 8 Bulan Pandemi Virus Corona Di Indonesia," 21 November, 2020,

virus COVID-19,² Indonesia memiliki populasi penduduk hingga 270 juta orang yang menyebabkan rentannya Indonesia sebagai Negara yang berdampak virus corona. Pada bulan maret Indonesia tercatat ada dua pasien positif COVID-19, namun satu bulan selanjutnya justru meningkat hingga berkali-kali lipat.³ Kejadian ini sehingga memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Salah sektor yang merasakan dampaknya adalah sektor ekonomi, dimana pelemahan sektor ini disebabkan oleh kepanikan membeli produk. Akhirnya banyak orang yang langsung memberi barang secara banyak, sehingga barang menjadi langka dan harga tidak bisa terkontrol. Hal ini juga terjadinya sebuah penimbunan alat pelindung diri, seperti masker dan cairan disinfektak, sehingga bagi masyarakat ekonomi bawah justru malah membuatnya terpuruk.

Problematika selanjutnya adanya perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan turunnya permintaan komoditas ekspor.⁵ Hal ini tentu akan mempengaruhi neraca dan menghambat transaksi Negara dalam menghasilkan devisa dan pajak. Terpuruknya ekonomi Indonesia

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/180600865/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

² Lihat dalam, Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Mata Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020).

³ katakata.co.id, "Panic Buying Dan Ancaman Virus Corona Menjangkiti Bisnis Retail," 17 Maret, 2020, <https://katadata.co.id/pingitaria/indepth/5e9a421407847/panic-buying-dan-ancaman-virus-corona-menjangkiti-bisnis-retail>.

⁴ Lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 di Indonesia lihat dalam, Rizqon H Syah, "Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 5 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.

⁵ Kishor P. Bholane, "Impact of Corona Outbreak on Global Economy," *UGC Care Journal* 31, no. 9 (2020).

juga disokong oleh konsumsi yang tinggi dan sebagainya bisnis pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya. Sektor produksi juga tidak dapat berjalan karena permintaan yang lebih rendah, sehingga berdampak pada penutupan para pabrik karena tidak bisa menjalankan roda ekonominya. Sementara hancurnya sektor pariwisata disebabkan oleh turunnya wisatawan asing secara drastis yang menyebabkan berbagai situs pariwisata dan ribuan hotel dirumahkan.⁶ Sehingga berdampak pada pemberhentian beberapa karyawan dikarenakan tidak adanya masukan untuk membayarnya. Hal ini tentunya akan berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan yang akan terjadi dalam jangka panjang dan akan memacu resesi ekonomi yang sangat menakutkan.

Sektor mikro juga mengalami situasi yang lebih mengerikan, yaitu menurunnya daya beli yang mengakibatkan turunnya permintaan yang menyebabkan kerugian bagi usaha kecil yang terancam gulung tikar dan tidak mampu membayar angsuran pada bank. Kejadian ini tentu akan menciptakan bola kemiskinan yang sangat meningkat. Kondisi ini menimbulkan tahun 2020 sebagai tahun penentuan Negara mempertahankan ekonominya, dimana ekonomi Negara saat ini tenggelam dikarenakan dampak penyebaran virus corona.⁷ Sehingga diperlukan kebijakan jangka pendek untuk mencegah resesi ekonomi yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kunci

⁶ Lihat dalam, detikfinance, "4 Masalah Utama Yang Beban Pengusaha Di Tengah Pandemi," 23 Juli, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5105163/4-masalah-utama-yang-bebani-pengusaha-di-tengah-pandemi>.

⁷ BBC NEWS INDONESIA, "Virus Corona: UMKM Diterjang Pandemi Covid-19 Sampai 'Kembang Kempis,'" 19 Maret, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51946817>.

kebijakan adalah meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga sektor konsumsi bisa naik. Implikasinya adalah sektor produksi dapat berjalan dengan menyediakan paket sosial bagi masyarakat guna mempertahankan hidupnya.

Problem ekonomi selanjutnya adalah struktur anggaran dalam hal pendapatan lebih kecil daripada anggaran, sehingga kekurangannya ditutupi oleh hutang luar negeri. Dengan wabah virus korona ini memberikan tekanan pada fiskal, pemerintah tidak memiliki anggaran atau alokasi anggaran untuk mengatasi wabah ini, sehingga pengeluaran Negara akan diperbaiki, yaitu pemotongan anggaran yang digunakan untuk menangani wabah, sehingga dapat dipastikan akan tidak ada pengembangan pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2019 defisit anggaran adalah 3%, sesuai dengan hukum yang berlaku maka pada tahun 2020 pemerintah akan mengusulkan amandemen Undang-undang defisit anggaran 5% dari PDB.⁸

Problem hutang Indonesia ini disebabkan rendahnya rasio pajak yang diterima dibandingkan dengan PDB. Sehingga dalam jangka panjang akan memberi tekanan pada fiskal yang merupakan aspek likuiditas dan solvabilitas Negara dalam membayar pokok dan bunga dari hutang. Pada akhirnya Negara akan menggali lubang dan menutup lubang. Meskipun hutang pada dasarnya merupakan strategi pengungkit dalam pertumbuhan ekonomi yang diciptakan dalam meningkatkan pembangunan, namun masalahnya adalah hutang jangka pendek

⁸ Adi Wicaksono, "Covid-19, Gejolak Ekonomi Global, Dan Fleksibilitas APBN," *CNBCINDONESIA*, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200331104259-14-148681/covid-19-gejolak-ekonomi-global-dan-fleksibilitas-apbn>.

digunakan untuk investasi jangka panjang.⁹ Sehingga ujung fiscal selalu tertekan oleh angsuran hutang yang jatuh tempo. Sehingga defisit anggaran yang melebar harus diwaspadai oleh pemerintah dengan menghadapi saat ini. Jika Indonesia mengalami default, maka kepercayaan Negara lain akan hilang, sehingga perdagangan internasional (ekspor-impor) terganggu.¹⁰ Jika hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan pelemahan cadangan devisa Negara.

Permasalahan ekonomi akibat wabah COVID-19 selanjutnya adalah jatuhnya nilai tukar Rupiah. Selama tiga bulan terakhir Rupiah mengalami koreksi dalam depresiasi terhadap nilai Dolar AS. Melemahnya nilai tukar Rupiah ini disebabkan oleh jatuhnya pasar saham dan pasar uang. Dimana semua investor menarik investasinya, sehingga mengakibatkan penurunan tajam dalam Composite Index tingginya permintaan Dolar AS. Hal ini menyebabkan Rupiah terdepresiasi secara mendalam akibat jatuhnya pasar saham dan pasar uang di Indonesia.¹¹

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Akibatnya virus ini telah mampu melumpuhkan ekonomi seluruh Negara yang terkena virus ini. Bagi Indonesia, berdasarkan Lembaga Analisis Keuangan *Moody's*

⁹ CNNINDONESIA, "Banyak Jalan Menuju Utang Di Masa Pandemi Corona," 24 Agustus, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200813215830-532-535527/banyak-jalan-menuju-utang-di-masa-pandemi-corona>.

¹⁰ Lihat dalam, Eka Budiyan & iLisnawati, "Analisis Faktor Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Resiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2010).

¹¹ Haryanto, "Dampak Covid-19 Terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)," *The Indonesian Journal of Development Planning* IV, no. 2 (2020).

memprediksi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, dari 4,9 % menjadi 4,8 %. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti sementara dan beberapa mengizinkan seluruh karyawannya di rumah (*work from home*), bahkan juga banyak perusahaan yang memperhentikan pekerjaannya karena menurunnya permintaan jumlah produksi dan tidak mampu membayar karyawannya.¹²

Problematika perekonomian (khususnya ekonomi masyarakat berupa UMKM) di era pandemi COVID-19 tentu memerlukan sebuah langkah dan peran dari pemerintah. Sementara dalam kondisi lain, ekonomi Islam hadir sebagai manifestasi mewujudkan nilai-nilai agama dalam hal ekonomi (termasuk peran pemerintah dalam hal ekonomi). Dari problematika dan model pendekatan di atas, kajian ini memiliki tujuan untuk melihat peran pemerintah dalam menyelamatkan sector UMKM di era pandemi COVID-19 dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana langkah dan peran pemerintah Indonesia dalam meyelamatkna UMKM di era pandemi COVID-19?. 2). Bagaimana langkah dan peran pemerintah Indonesia dalam meyelamatkna UMKM di era pandemi COVID-19 dalam perspektif ekonomi Islam?.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian yang bersifat studi kepustakaan secara murni, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur yang terdiri

¹² KOMPAS.com, "Dampak Corona, Asosiasi Pengusaha: PHK Selalu Jadi Pilihan Terakhir," 20 Maret, 2020.

dari buku, jurnal, berita online, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan obyek pembahasan.¹³ Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik analisis data menggunakan teknik analitis-kritis¹⁴ terhadap ketentuan ekonomi Islam yang digunakan analisis dalam melihat peran pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di era COVID-19

Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hingga PHK di Era Wabah COVID-19

Dengan adanya situasi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini dan sedang memasuki era new normal telah banyak membawa dampak di sektor kesehatan, perekonomian bahkan sosial pada masyarakat Indonesia.¹⁵ Selama pandemi ini berlangsung telah banyak PHK dimana-mana, daya beli masyarakat menurun karena penghasilan ikut mengalami penurunan, dan para pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan omzet penjualannya dan masih banyak dampak yang lainnya. Adanya anjuran untuk tetap berada di rumah telah membuat warga enggan untuk bepergian dan berbelanja. Selain itu adanya anjuran untuk menjaga jarak berimbas penutupan di tempat

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009): 3.

¹⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013): 28.

¹⁵ Lihat, Dana Riksa Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020).

pariwisata. Sehingga pandemi COVID-19 yang dimulai awal Maret lalu berimbas juga pada pendapatan.

Dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 yang imbasnya cukup luar biasa di masyarakat. Selain dampak di atas, imbas dari adanya pandemi COVID-19 juga terjadi pada sektor UMKM, melemahnya sektor UMKM di era pandemi COVID-19 ini tentu disebabkan oleh berbagai kebijakan tentang pembatasan berskala besar (PSBB), gerakan di rumah aja, dan dirumahkannya semua kegiatan. Sehingga kondisi tersebut membuat terbenturnya semua bentuk ekonomi dan para pelaku UMKM.¹⁶

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sector UMKM sebagai salah satu pilihan. Seperti kegiatan dagang seperti menjual kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, sandal, warung, jasa parut kelapa, kue-kue dan barang-barang lainnya. Dengan adanya usaha yang demikian diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar pencapaian ini dapat dilakukan secara maksimal maka dianggap perlu menggali potensi yang ada untuk dikembangkan lebih jauh.¹⁷

¹⁶ Serambinews.com, "Dampak Pandemi Covid 19, Omzet UMKM Turun Hingga 75 Persen," 08 Oktober, 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/08/dampak-pandemi-covid-19-omzet-umkm-turun-hingga-75-persen>.

¹⁷ LIPUTAN6, "HEADLINE: Nasib Dunia Usaha Di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan Atau Justru Tumbuh?," 18 April, 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228742/headline-nasib-dunia-usaha-di-tengah-pandemi-corona-siapa-bertahan-tertekan-atau-justru-tumbuh>.

Permasalahan lain yang menjadi dampak dari penyebaran wabah ini adalah terjadinya PHK secara besar-besaran. PHK ini disebabkan oleh penurunan permintaan produksi, sehingga guna menjaga bisnisnya mereka mengurangi karyawannya karena tidak bisa membayarnya. Korban PHK ini akan meningkatkan banyaknya pengangguran yang membawa masalah dalam perekonomian keluarga, sehingga kemiskinan menjadi meningkat.

Adanya PHK dari beberapa pabrik dilakukan guna mengurangi beban biaya operasional. Hal ini akan berdampak pada perekonomian nasional dari pertumbuhan ekonomi, PDB, inflasi dan pendapatan per kapita. Banyaknya pengangguran ini pada akhirnya akan berdampak pada komunitas sosial ekonomu dan menyebabkan penyakit sosial meningkat, seperti kejahatan, dan terpuruknya kesehatan masyarakat dan rendahnya pendidikan. Sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang amat rendah.¹⁸

Kondisi ini tentu menjadi tugas yang sangat sulit bagi Negara. Dalam jangka pendek adalah bagaimana memberikan pendapatan bagi korban PHK untuk memenuhi kehidupan mereka. Sedangkan memberikan pekerjaan dalam kondisi saat ini juga menjadi sesuatu yang mustahil.¹⁹ Sementara dalam rangka menanggulangi permasalahan ini, pemerintah memberikan sebuah kebijakan dalam rangka mencegah

¹⁸ Endang Naryono, "Impact Of National Disaster Covid-19, Indonesia Toward Economic Recession," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi*, 2020, 3–6.

¹⁹ Riyanti Djalante, "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 In Indonesia: Periodof January to March 2020," *Progress in Disaster Science*, no. 6 (2020): 1.

penyebaran virus ini serta meminimalisir dampak-dampaknya (ekonomi dan sosial) dengan:²⁰

1. Menerapkan *physical distancing*.
2. Membentuk Satgas penanggulangan wabah corona.
3. Membangun rumah sakit khusus bagi pasien corona.
4. Menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di daerah *red zone*.
5. Memberikan insentif bagi pengguna energi listrik secara gratis selama tiga bulan bagi pengguna 450 VA dan diskon 50% bagi pengguna 900 VA.
6. Menyediakan jejaring pengamanan sosial dalam bentuk paket kebutuhan dasar masyarakat selama enam bulan.
7. Memberikan insentif bagi mereka yang terkena dampak PHK dengan memberikan Kartu Pra-kerja.
8. Memberikan insentif relaksasi pembayaran cicilan pembayaran bagi korban terkena virus corona.

Kajian Terhadap Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dua suku kata yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang memiliki arti perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah.²¹ Kata Islam dalam ekonomi Islam itu sendiri merupakan suatu ciri khas dalam ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Jadi, perspektif ekonomi Islam

²⁰ Imas Novita Juaningsing dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar' i* 7, no. 6 (2020).

²¹ Boedi Abdullah & Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014): 24.

yaitu pandangan terhadap perilaku ekonomi manusia yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap tindakan atau perilaku perekonomian yang dilarang dalam Islam seperti: *Bai'a Najazy, Itikhar, Taghrir* dan *Riba*.²² Sehingga dari sini dapat difahami bahwa misi utama dari ekonomi Islam adalah guna menciptakan sebuah sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan dan keadilan.²³

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:²⁴

1. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia diciptakan tujuannya adalah untuk beribah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. *'Adl* (Keadilan)

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015): 6.

²³ Lihat, Siti Amaroh & Masturin, “The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia,” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*: 34-42.

adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.²⁵

3. *Nubuwwah* (Kenabian)

Karena rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala, Allah. Untuk umat muslim Allah telah mengirimkan manusia model terakhir yang sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW.

Sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut: *Siddiq* (Jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual), dan *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin

²⁵ Abdurrohman Kasdi, "Actualizations Of Maqasid Al-Shariah In Modern Life: Maqasid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 257.

dan pemakmur bumi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak manusia.

5. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “dunia adalah lading akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh). Setiap perjuangannya akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Peran Pemerintah dalam Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Krisis ekonomi global merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi, hal ini disebabkan oleh tidak adanya keastian kapan pandemi COVID-19 berakhir. Dimana dana moneter internasional (IMF) telah mencatat bahwa ekonomi dunia telah menyusut sampai 5 persen pada periode Juni 2020 dan pada akhir 2020 telah menurun hingga 7 persen.

Sehingga dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi menyebut krisis ekonomi begitu parah dan meminta seluruh menteri dan jajaran pemerintahan untuk bekerja keras dan cepat. Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyampaikan harapannya agar perekonomian Indonesia tidak semakin melemah saat pandemi COVID-19.

Guna menyelesaikan dan menanggulangi akan terjadinya krisis ekonomi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah perhatian terhadap eksistensi dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Alasan pemerintah menjadikan UMKM sebagai penolong krisis ekonomi tak lain karena kontribusi UMKM di masa lalu. Kilas balik krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1998, UMKM saat itu juga menjadi pahlawan karena mampu meningkatkan nilai ekspor hingga 350 persen. Dimana dalam situasi sebelum pandemi COVID-19, peran UMKM pada tahun 2019 sudah menggapai 60,34 perseb terhadap PDB Nasional, 14,17 persen terhadap nilai ekspor, 58,18 persen terhadap nilai investasi, dan telah membuka kesempatan tenaga kerja melebihi 90 persen.²⁶

Namun semenjak kemunculan wabah COVID-19, penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain itu, masih terdapat permasalahan lain yang dirasakan oleh pelaku UMKM, diantaranya kurangnya sumber daya manusia hingga tidak adanya dukungan kelembagaan. Melihat potensi dan peluang yang dimiliki oleh UMKM dan tidak ingin

²⁶ KOMPASPEDIA, "Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Indonesia," 19 September, 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perkembangan-kebijakan-pemerintah-terhadap-umkm-di-indonesia>.

perekonomian Indonesia semakin terperosok ke dalam krisis, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan Presiden Jokowi berupa bantuan presiden atau bantuan presiden kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Sebagai tahap awal, jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM.

Usaha bantuan yang diberikan tersebut bertujuan guna memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang mengalami penurunan modal. Dimana proses pemberian modal tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM secara langsung melalui rekening mereka masing-masing. Tidak hanya dukungan permodalan, upaya pemulihan ekonomi lainnya juga digagas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meluncurkan e-katalog sejak awal Juli 2020. Peluncuran e-katalog ini bertujuan guna meningkatkan daya saing dan kemampuan para pelaku UMKM di era digital, mengingat hanya sekitar 4 sampai 10 persen para pelaku UMKM yang mampu bersaing di era digital saat ini. Minimnya nilai tersebut didasari oleh rendahnya pendidikan dan sosialisasi penjualan online kepada para pelaku UMKM. Menurut survei dari Katadata Insight Center, UMKM memang mengalami banyak kendala dalam penggunaan teknologi digital. Sebanyak 34 persen pelaku UMKM masih belum bisa menggunakan internet dan 23,8 persen mengindikasikan minimnya pengetahuan dalam menjalankan bisnis online.

Selain adanya program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa e-katalog, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM guna

menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital dalam usahanya pada akhir tahun 2020 ini. Dalam program ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan marketplace yang akan membantu memberikan pembinaan kepada UMKM dalam beralih ke digital. Dengan target tersebut, setidaknya perlu tahapan dan dukungan yang panjang dari semua pihak untuk kembali meningkatkan peran UMKM di tengah pandemi COVID-19.²⁷

Selain adanya kebijakan bantuan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM, pemerintah Indonesia yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo mencetuskan kebijakan program kartu pra kerja. Dimana Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, dimana dalam peraturan tersebut telah mengubah peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.²⁸ Salah satu bentuk perubahannya adalah maksud dan tujuan dari program kartu pra-kerja. Awalnya, program kartu pra kerja hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sekarang penggunaan program telah ditambahkan ke satu poin lagi. Tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan karena dalam program kartu prakerja, pelaku UMKM bisa mendaftar nanti.²⁹

²⁷ ANTARAKALBAR, "Upaya Pemerintah Memaksimalkan Peran UMKM Di Masa Pandemi COVID-19," 22 Agustus, 2020.

²⁸ DDTTC, "Resmi! Jokowi Luncurkan Program Bantuan Presiden Usaha Mikro Kecil," 24 Agustus, 2020, <https://news.ddtc.co.id/resmi-jokowi-luncurkan-program-bantuan-presiden-usaha-mikro-kecil-23342>.

²⁹ REPLUBIKA.co.id, "Tujuan Program Kartu Prakerja Ditargetkan Untuk Kompetensi," 12 Maret, 2020, <https://nasional.republika.co.id/berita/q738jo349/tujuan-program-kartu-prakerja-ditargetkan-untuk-kompetensi>.

Dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan program kartu pra kerja adalah guna mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dan guna mengembangkan kewirausahaan. Adanya perubahan tujuan program kartu pra kerja ini membuat kriteria peserta juga berubah. Selain para pencari kerja, program ini juga bisa diikuti oleh pekerja yang di-PHK. Kemudian kepada pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Ada dua kriteria untuk kelompok ini, yang pertama adalah pekerja yang dipulangkan dan yang kedua adalah pekerja yang bukan pencari nafkah, termasuk usaha mikro kecil menengah.³⁰

Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan para pelaku UMKM sesuai yang telah disampaikan di atas merupakan sebuah langkah dan peran tanggungjawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.³¹ Karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian. Hal tersebut senada dengan prinsip utama ekonomi Islam, yaitu:

³⁰ okefinance, "Alasan Jokowi Masukkan UMKM Jadi Peserta Kartu Prakerja," *10 Juli*, 2020, <https://economy.okezone.com/read/2020/07/10/320/2244245/alasan-jokowi-masukkan-umkm-jadi-peserta-kartu-prakerja>.

³¹ Lihat dalam, Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Salah satu manifestasi dari sifat ketuhanan adalah merealisasikan sifat ketuhanan pada aspek kemanusiaan. Dalam hal peran pemerintah dalam memberdayakan para pelaku UMKM di era pandemi ini adalah sebagai wujud aktualisasi dari sifat ketuhanan. Sehingga dalam berbagai kebijakan dan langkah pemerintah dalam memberdayakan dan membantu para pelaku UMKM di era pandemi COVID-19 merupakan sebuah langkah yang tepat dan sesuai dengan nilai ketuhanan dalam ekonomi Islam. Karena bidang ekonomi ini merupakan sebuah bidang yang amat penting, sehingga membutuhkan pelaksanaan dan solusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.

2. *Al-Adl* (Keadilan)

Pandemi COVID-19 tentu memiliki dampak pada mereka yang berada pada ekonomi rendah, sehingga kondisi tersebut akan menambah jurang yang amat dalam pada struktur ekonomi masyarakat. Kebijakan dan langkah pemberdayaan para pelaku UMKM oleh pemerintah Indonesia ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam. Sehingga harapan dari langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi problematika ekonomi di masa COVID-19 ini merupakan sebuah misi untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

3. *Nubuwah* (Kenabian)

Jujur dalam menjalankan amanah, bertanggungjawab akan masalah yang dihadapi, cerdas dalam menentukan solusi, dan membangun komunikasi dan kerja sama dalam menentukan sebuah solusi dan kebijakan adalah merupakan perwujudan dari prinsip

ekonomi Islam berupa sifat kenabian. Kebijakan dan langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi problematika ekonomi merupakan bentuk perwujudan dan manifestasi sifat kenabian dalam bidang ekonomi.

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Fungsi dari pemerintah adalah untuk mengayomi, mendisiplinkan, dan menentukan arah kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam menghadapi problematika ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah Indonesia menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi dengan cara menyelesaikan problematikanya. Sehingga prinsip pemerintahan dalam ekonomi Islam ini ditujukan untuk mengendalikan arah kebijakan yang merata dan membawa kemaslahatan bagi semua masyarakat.

5. *Ma'ad*

Arti dari sebuah kembalinya sebuah pemerintahan adalah sebuah pertanggungjawaban kelak dihadapan Tuhan. Prinsip ekonomi Islam ini dalam melihat langkah dan peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 ini adalah sebuah manifestasi pertanggungjawaban pemerintah atas amanah yang diberikan kepadanya.

Kesimpulan

Dalam situasi pandemi COVID-19, sektor ekonomi menjadi salah satu sector yang mengalami permasalahan yang sangat pelik. PHK dan matinya sektor UMKM menjadi bukti permasalahan sendiri di bidang ekonomi. Dalam situasi tersebut pemerintah mengambil sebuah

kebijakan dalam rangka menyelesaikan dan merespon masalah-masalah tersebut. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM serta memberikan sarana kartu pra kerja sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia. Dalam langkah dan peran pemerintah Indonesia dalam merespon dan menyelesaikan problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 dalam perspektif ekonomi Islam merupakan perwujudan dari nilai-nilai fundamental dari ekonomi Islam, yaitu untuk mewujudkan keadilan, bentuk tanggung jawab, dan sarana pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa langkah dan peran pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM di era COVID-19 sebagai langkah yang sangat tepat. Namun dalam kondisi di lapangan, nampaknya bantuan tersebut terkadang tidak digunakan untuk mengembangkan UMKM yang digelutinya dan digunakan untuk kepentingan lain.

Daftar Rujukan

- Abdurrohman Kasdi. (2019). "Actualizations Of Maqasid Al-Shariah In Modern Life: Maqasid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol.16, No. 2: hlm. 257.
- Adi Wicaksono. (2020). "Covid-19, Gejolak Ekonomi Global, Dan Fleksibilitas APBN." *CNBCINDONESIA*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200331104259-14-148681/covid-19-gejolak-ekonomi-global-dan-fleksibilitas-apbn>.
- Adiwarman A. Karim. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2020). "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* Vol5, No. 2.
- ANTARAKALBAR. "Upaya Pemerintah Memaksimalkan Peran UMKM Di Masa Pandemi COVID-19." 22 Agustus, 2020.
- BBC NEWS INDONESIA. "Virus Corona: UMKM Diterjang Pandemi Covid-19 Sampai 'Kembang Kempis.'" 19 Maret, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51946817>.
- Bholane, Kishor P. (2020). "Impact of Corona Outbreak on Global Economy." *UGC Care Journal* Vol.31, No. 9.
- Boedi Abdullah & Beni Ahmad saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- CNNINDONESIA. "Banyak Jalan Menuju Utang Di Masa Pandemi Corona." 24 Agustus, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200813215830-532-535527/banyak-jalan-menuju-utang-di-masa-pandemi-corona>.
- Dana Riksa Buana. (2020). "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* Vol.7, No. 3.
- DDTC. "Resmi! Jokowi Luncurkan Program Bantuan Presiden Usaha Mikro Kecil." 24 Agustus, 2020. <https://news.ddtc.co.id/resmi-jokowi-luncurkan-program-bantuan-presiden-usaha-mikro-kecil-23342>.
- detikfinance. "4 Masalah Utama Yang Bebani Pengusaha Di Tengah Pandemi." 23 Juli, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5105163/4-masalah-utama-yang-bebani-pengusaha-di-tengah-pandemi>.
- Eka Budiyan & iLisnawati. (2010). "Analisis Faktor Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Resiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol.1, No. 1.
- Endang Naryono. "Impact Of National Disaster Covid-19, Indonesia Toward Economic Recession." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi*, 2020, hlm. 3–6.
- Haryanto. (2020). "Dampak Covid-19 Terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)." *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. 4, No. 2.
- Imas Novita Juaningsing dkk. (2020). "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 Terhadap Masyarakat

- Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* Vol.7, No. 6.
- katakata.co.id. “Panic Buying Dan Ancaman Virus Corona Menjangkiti Bisnis Retail.” *17 Maret*, 2020. <https://katadata.co.id/pingitaria/indepth/5e9a421407847/panic-buying-dan-ancaman-virus-corona-menjangkiti-bisnis-retail>.
- KOMPAS.com. “Dampak Corona, Asosiasi Pengusaha: PHK Selalu Jadi Pilihan Terakhir.” *20 Maret*, 2020.
- . “Perjalanan 8 Bulan Pandemi Virus Corona Di Indonesia.” *21 November*, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/180600865/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- KOMPASPEDIA. “Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Indonesia.” *19 September*, 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perkembangan-kebijakan-pemerintah-terhadap-umkm-di-indonesia>.
- LIPUTAN6. “HEADLINE: Nasib Dunia Usaha Di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan Atau Justru Tumbuh?” *18 April*, 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228742/headline-nasib-dunia-usaha-di-tengah-pandemi-corona-siapa-bertahan-tertekan-atau-justeru-tumbuh>.
- Mestika Zed. (2009). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- okefinance. “Alasan Jokowi Masukkan UMKM Jadi Peserta Kartu Prakerja.” *10 Juli*, 2020. <https://economy.okezone.com/read/2020/07/10/320/2244245/alasan-jokowi-masukkan-umkm-jadi-peserta-kartu-prakerja>.
- REPLUBIKA.co.id. “Tujuan Program Kartu Prakerja Ditargetkan Untuk Kompetensi.” *12 Maret*, 2020. <https://nasional.republika.co.id/berita/q738jo349/tujuan-program-kartu-prakerja-ditargetkan-untuk-kompetensi>.
- Riyanti Djalante. (2020). “Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 In Indonesia: Period of January to March 2020.” *Progress in Disaster Science*, no. 6: 1.
- Rizqon H Syah. (2020). “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* Vol.7, No. 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.

- Serambinews.com. “Dampak Pandemi Covid 19, Omzet UMKM Turun Hingga 75 Persen.” 08 Oktober, 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/08/dampak-pandemi-covid-19-omzet-umkm-turun-hingga-75-persen>.
- Siti Amarah & Masturin. (2018). “The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.11, No. 2.
- Siti Khodijah Nurul Aula. (2020). “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Mata Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol.3, No. 1.